

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2012

Fitra Kusuma Wijaya

and

Dra. Wan Asrida, M.si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: fitrakusumawijaya@ymail.com

Abstract

This research aims to understand: (a). Implementation between curriculum used in schools in Pekanbaru to the standard criteria for RSBI. (b). Curriculum development integration model in RSBI's school in Pekanbaru. (c). Implementation of the program in RSBI's schools in Pekanbaru. (d). problem encountered in the implementation of the program. (e). Factors that influence the implementation process of RSBI program. (F). The solutions of RSBI schools in overcoming that problem. This study uses a qualitative descriptive approach. The data were collected from observation, interview and documentation. The findings of the data obtained as follows: (a). In general, the purpose, content, strategy and organization of RSBI program in accordance with international standards that adapted. (b). implementation of the program is targeted students, as an object that the implementation of the policy, teachers and the implementation of policies and institutions or schools, as a means to promote learning in preparing and facilitating all the needs of teachers and students in the learning process. (c). In the preparation and implementation of the program RSBI many problems one of which is the lack of willingness of policymakers in facilitating policy. (d). The solution is carried out by the principle of coaching / development and training for teachers, principals so the program can be run as a hard and fast rule that the answer is found in accordance with the theory of policy implementation that is used in this program from the beginning through to post judgment pulp by the constitution lawcourt.

Keywords: analysis, policy, program RSBI.

Pendahuluan

Upaya meningkatkan mutu pendidikan secara nasional merupakan salah satu agenda yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat, yakni suatu penjaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan lembaga tersebut sesuai harapan mereka. Hal tersebut sangat penting, mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat global, sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki bermutu.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 dinyatakan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah melakukan berbagai cara, inovasi serta kebijakan. Salah satunya adalah dengan melahirkan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Terbentuknya Program rintisan sekolah bertaraf internasional ini mengacu pada pasal 50 ayat 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berstandar internasional.

Menurut pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 tahun 2009, tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional, RSBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *Organization Economic Cooperation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya. Permendiknas yang diterbitkan beberapa tahun setelah rintisan sekolah bertaraf internasional pertama dibentuk menegaskan secara hukum ketentuan-ketentuan teknis dan kriteria rintisan sekolah bertaraf internasional/sekolah bertaraf internasional itu ke dalamnya. Ketentuan itu mencakup standar proses pembelajaran, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan seterusnya yang semuanya harus diperkaya dengan standar negara anggota *Organization Economic Cooperation and Development* (OECD) atau negara maju di luar negara anggota OECD. Termasuk juga persyaratan calon peserta didik, pembiayaan, perizinan penyelenggaraan, sampai kultur sekolah.

Rintisan sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang dipersiapkan secara bertahap melalui pembinaan oleh pemerintah dan *stakeholders*, dalam jangka waktu tertentu yaitu tiga sampai tujuh tahun dan diharapkan sekolah tersebut mampu dan memenuhi kriteria untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional.

Tujuan rintisan sekolah bertaraf internasional secara umum adalah menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan nasional yang diperkaya dengan standar kompetensi

internasional dan kecakapan hidup yang dikembangkan berdasarkan *multiple intelegencenya*. Pekanbaru sejak tahun 2007 sebagai Ibukota Provinsi Riau juga turut serta mengadakan program rintisan sekolah bertaraf internasional ini. Sekolah di Kota Pekanbaru dengan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional di Kota Pekanbaru Tahun 2012

| Daftar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Pekanbaru | | |
|--|--|--------|
| Tipe sekolah | Nama Sekolah | Jumlah |
| Sekolah Dasar | 1. SDN 036 Teladan | 1 |
| Sekolah Menengah Pertama | 1. SMPN 1 2. SMP Babussalam | 2 |
| Sekolah Menengah Atas | 1. SMAN Plus Riau 2. SMA 8 3. SMA Cendana 4. SMA Babussalam | 4 |
| Sekolah Menengah Kejuruan | 1. SMKN 1 2. SMKN 2 3. SMKN 3 | 3 |
| Jumlah | | 10 |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2012

Dalam penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional tersebut setiap tahunnya harus dilakukan supervisi, evaluasi, dan monitoring untuk mengetahui sejauh mana tercapainya pemenuhan unsur standar nasional pendidikan (SNP) yang disebut sebagai indikator kinerja kunci minimal (IKKM) dan diperkaya/dikembangkan/diperluas/diperdalam dengan komponen, aspek, atau indikator kompetensi yang isinya merupakan penambahan atau pengayaan/pendalaman/penguatan/perluasan dari delapan standar nasional pendidikan tersebut sebagai indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) dan berstandar internasional dari salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya. Begitu juga dengan rintisan sekolah bertaraf internasional di kota pekanbaru, pelaksanaan sistem rintisan sekolah bertaraf internasional selama masa tiga hingga tujuh tahun menuju suatu tujuan yaitu sekolah standar internasional membutuhkan pengawasan yang baik, agar tujuan tersebut bisa dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengawasan yang baik tersebut akan menunjang pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional ke arah yang lebih baik. Maka dari itu perlunya pengawasan dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Riau terhadap sistem rintisan sekolah bertaraf internasional ini.

Pada 8 januari 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membatalkan Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional. Artinya keberadaan rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Uji materi ini diajukan oleh Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) yang terdiri dari sejumlah orang tua/wali

murid yang anaknya sekolah di rintisan sekolah bertaraf internasional dan/atau yang anaknya gagal masuk sekolah ‘mahal’ itu karena faktor biaya. Mereka diadvokasi oleh Tim Advokasi “Anti Komersialisasi Pendidikan” dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

Fakta lain adalah bahwa siswa di sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional harus membayar biaya lebih banyak dikarenakan agar dapat menikmati fasilitas lebih untuk menunjang program rintisan sekolah bertaraf internasional tersebut. Untuk itu sekolah melakukan pemungutan biaya terhadap wali murid, agar tidak terjadi penyimpangan indikasi nepotisme yang berujung korupsi. Karena selama ini sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional selain dari anggaran khusus pemerintah, terindikasi kuat meminta biaya tambahan kepada wali murid yang memberatkan masyarakat dalam dunia pendidikan melalui berbagai pungutan yang berlebihan. Untuk mencegah terjadinya hal ini peran pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Riau guna meminimalisir dan mencegah terjadinya hal tersebut perlu ditingkatkan.

Berdasarkan masalah diatas untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Implementasi Kebijakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Pekanbaru**, baik dari segi awal bagaimana perjalanan penerapan program inovasi pendidikan ini diterapkan, hingga proses berjalannya program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ini di Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Dari masalah dan asumsi tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di kota Pekanbaru.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan Ilmu Politik terutama di Bidang Pendidikan.
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Kegunaan penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak yang membutuhkan.

Metode Penelitian

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarnya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Implementasi Kebijakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Pekanbaru Tahun 2012

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Untuk mempermudah penulis dalam melihat implementasi kebijakan tentang program rintisan sekolah bertaraf internasional, maka penulis melakukan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai acuan untuk melihat implmentasi kebijakan program dari pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Program dan Kegiatan RSBI antara lain yaitu:

1. Mempersiapkan kurikulum yang mengacu pada kurikulum Negara Maju
2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
3. Melatih guru-guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran
4. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru
5. Mendapatkan pendampingan dari Tenaga ahli
6. Menjalani *sister school*
7. Meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa Internasional
8. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO)
9. Menyelenggarakan pelatihan *Leadership* untuk Kepala Sekolah
10. Melengkapi Sarana dan Prasarana Sekolah.

Dengan demikian untuk melihat apakah program RSBI yang dilakukan oleh para pelaksana itu berhasil atau tidaknya maka dapat dilihat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marille S. Grindle, yaitu keberhasilan suatu kebijakan

ditentukan oleh kebijakan itu sendiri yang terdiri dari konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Merille S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel Isi Kebijakan Mencakup:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- b. Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. Apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- f. Apakah sumber dayanya telah memadai.

Sedangkan Variabel Lingkungan Implementasi mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi isi atau konteks ditetapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat dan melaksanakan peraturan telah sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga dapat terjadi perubahan yang diinginkan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle tersebut, maka dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk dapat meningkatkan keberhasilan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maka kebijakan tersebut harus memihak kepada rakyat.

Pada proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi dan kelompok sasaran yang mengakibatkan munculnya tekanan yang diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Selain itu implementasi merupakan proses interaksi antar penyusun tujuan dengan sarana tindakan dalam mencapai suatu tujuan dan menghubungkan hubungan klausal antara hal yang diinginkan dengan cara mencapai tujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu kebijakan harus dapat diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka untuk dapat terlaksananya sebuah kebijakan perlu adanya variabel dari kebijakan tersebut. Variabel-variabel yang dimaksud.

a. Variabel Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang terpenuhi dengan adanya program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)

Rintisan sekolah bertaraf internasional diselenggarakan atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa *Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional*. Sementara pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pendidikan Nasional nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan RSBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Pekanbaru sebagai ibukota provinsi pada tahun 2007 ikut andil dalam pelaksanaan program ini guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Dengan rincinya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, diharapkan para pelaksana program RSBI seperti kepala sekolah dan guru dapat dengan mudah mengerti dan menerapkan berbagai aturan program yang telah dirancang dengan baik untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah, selain itu diharapkan dengan banyaknya acara sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah pusat kepada kepala sekolah dapat meminimalisir kesalaham-kesalahan guna menyempurnakan program ini.

Pada akhirnya kepentingan yang diinginkan masyarakat dengan adanya program ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Kendala biaya memang menjadi masalah yang perlu di atasi apabila program serupa kembali dibuat. Program RSBI memang sudah tepat, pelaksanaannya pun bisa dikatakan berhasil namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat berbagai kekurangan disisi lainnya. Untuk itu dari berbagai pernyataan narasumber yang menyayangkan dihapusnya program ini, mereka berharap pemerintah cepat tanggap untuk memfasilitasi atau kembali membuat program yang serupa namun lebih memperhatikan semua aspek dan mengayomi semua kepentingan golongan agar kesalahan seperti program RSBI yang telah dibuat tidak lagi berakhir dengan pembatalan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Jenis dan manfaat yang dihasilkan dengan adanya program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Tujuan utama dengan dibuatnya program RSBI adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar dapat berdaya saing dan diakui oleh dunia bahwa mutu pendidikan di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya.

Secara umum, kondisi RSBI sebelum pembubaran menunjukkan kemajuan-kemajuan positif meskipun sejumlah kekurangan masih ada dan harus diatasi. Hal yang paling menonjol dari kemajuan dan manfaat RSBI adalah kreativitas, inovasi dan daya juang warga sekolah. Warga RSBI lebih kreatif, inovatif dan bekerja keras untuk mencapai standar nasional dan prestasi-prestasi. Kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan komputer warga RSBI, baik kepala sekolah, guru, maupun siswa makin baik. Kekurangan utama pada RSBI adalah kemampuan pendidik dan tenaga pendidikan serta sarana dan prasarana.

Selain masalah biaya yang merupakan faktor utama pembubaran program RSBI, sejak tahun 2007 program ini dilaksanakan di Pekanbaru sebenarnya menunjukkan kemajuan yang pesat. *Input* RSBI (kurikulum, guru, sarana prasarana, dana, dsb) menunjukkan kemajuan walaupun diantaranya ada yang berjalan lambat. Pada prosesnya, RSBI telah melakukan pembenahan-

pembenahan dalam proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kepemimpinan, penilaian hasil belajar, kultur akademik sekolah, dan meningkatnya dukungan orangtua siswa.

Meskipun kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh RSBI cukup signifikan, namun masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Penerimaan peserta didik baru masih didominasi oleh anak-anak cerdas dari kalangan orangtua berstatus sosial ekonomi tinggi dan komitmen untuk menjangkau dari mereka yang miskin orangtuanya sebaiknya dari awal diperhatikan agar program ini tetap ada dan tidak dibubarkan.

Selain kekurangan-kekurangan yang bersumber dari dalam RSBI, masih banyak kekurangan yang bersumber dari luar RSBI. Pemahaman terhadap kebijakan RSBI dari para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, DPRD, LSM dan Pemerhati Pendidikan masih rendah, kurang merata, kurang akurat dan kurang konsisten. Ini semua berakibat lemahnya dukungan mereka terhadap pengembangan RSBI. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakn RSBI sebaiknya dulu harus dilakukan secara merata, akurat, dan konsisten kepada para pemangku kepentingan RSBI meskipun berada diluar tetapi sangat menentukan dukungannya, baik kebijakan, perencanaan maupun penganggarannya.

3. Derajat Perubahan yang Diinginkan dengan adanya Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Dengan adanya program RSBI, diharapkan RSBI menjadi wadah peningkatan derajat mutu pendidikan di Indonesia. Sudah sangat jelas harapan dari dibentuknya program ini guna menunjang mutu pendidikan dengan berbagai program yang telah diatur sedemikian rupa dalam memenuhi kriteria standar-standar negara maju agar mampu berdaya saing secara global di dunia internasional, penting kiranya program serupa dengan RSBI kembali dibentuk dengan syarat belajar dari kegagalan-kegagalan RSBI. Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dunia demi kepentingan dan penguatan nasionalisme, penguatan keunggulan lokal dan kemampuan bersaing dan bekerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan harus dikelola oleh bangsa Indonesia, bukan oleh bangsa lain. Indonesia juga memiliki keunggulan lokal yang sangat kaya dan beragam yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia yang kemudian dipasarkan ke seluruh dunia. Indonesia juga harus memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia sehingga terhindar dari ketergantungan sebagai konsumen, ini semua dapat direalisasikan melalui salah satu upaya yaitu program-program yang harus secepatnya dibentuk seperti RSBI yang lalu.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Terbentuknya Program rintisan sekolah bertaraf internasional ini mengacu pada pasal 50 ayat 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada

semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berstandar internasional. Sementara pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pendidikan Nasional nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan RSBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam proses pembentukan program RSBI baik pembuat kebijakan maupun aturan pelaksanaan semuanya sudah sangat jelas. RSBI merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan secara nasional diseluruh sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam pasal 28C ayat 1 UUD 1945 ditegaskan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”.

5. Siapa Pelaksana Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioanl

Dalam proses pelaksanaan program RSBI sekolah dituntut untuk lebih mandiri dan inovatif, sekolah sebagai pelaksana langsung dan langsung berhubungan dengan peserta didik dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional. Untuk itu sekolah harus melakukan pengembangan-pengembangan dalam bahan ajar, serta meningkatkan bahasa Inggris guru dan kepala sekolah serta semua unsur yang terlibat, baik dalam keterampilan komputer, kemandirian dana, laboratorium, perpustakaan digital, media pembelajaran, internet dan sarana prasarana penunjang lainnya yang harus dioptimalkan.

6. Sumber Daya yang Dikerahkan dalam Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan Organisasi sentral administrasi pemerintah daerah yang melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang pendidikan.

Sementara fungsi Dinas Pendidikan antara lain (1) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan. (2) Melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendidikan (3) melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan. (4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur.

Dalam hal program RSBI berdasarkan kewenangan pembagian urusan antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota peraturannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sementara tentang penyelenggaraan RSBI itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

Dari kedua acuan tersebut tidak terdapat alasan yang jelas siapa sebenarnya pelaksana pengawasan mengenai hal supervisi, evaluasi dan monitoring RSBI antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas pendidikan Kota Pekanbaru.

b. Variabel Lingkungan Implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Kekuasaan merupakan suatu hal yang menjadi tujuan banyak orang. Sebab dengan memiliki kekuasaan seseorang dapat menyampaikan kepentingan, dan untuk memainkannya dengan baik seseorang memerlukan strategi. Agar pelaksanaan dari suatu program dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan aturan baku yang sempurna, baik aturan untuk pemerintah, pemerintah daerah maupun kabupaten/kota.

Kurangnya keseriusan dari pemerintah pusat dalam menetapkan kerangka aturan yang jelas, membuat perjalanan program RSBI terhambat. Disisi lain, program besar skala RSBI yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia seharusnya diberikan mandat penuh pada masing-masing pemerintah daerah nyatanya pemerintah pusat enggan melepaskan dan masih ikut campur dalam hal pelaksanaannya didearah, di zaman otonomi daerah sekrang ini seharusnya pemerintah pusat harus lebih percaya dengan daerah guna meningkatkan daya saing antar provinsi mana yang lebih baik ketika menjalankan program yang diberikan pusat. Masih kentalnya peran pusat menimbulkan ketimpangan pelaksanaan daerah dalam melaksanakan program ini. Sehingga peran daerah kurang terasa padahal dalam pemenuhan unsur sarana dan prasarana lebih banyak menggunakan APBD dibanding APBN.

Jarak antar sekolah-sekolah RSBI dengan pusat merupakan rentang masalah utama apabila terdapat kekeliruan dalam hal pelaksanaan di daerah. Pemerintah pusat meninjau sekolah-sekolah RSBI hanya 1 tahun sekali membuat pelayanan terhadap program ini kurang maksimal. Untuk itu dari hasil wawancara penulis dengan berbagai narasumber mereka mengharapkan kejelasan yang sempurna dalam suatu program, pelayanan yang optimal dan program yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, tidak hanya siswa dari ekonomi menengah keatas tetapi juga siswa yang kurang mampu karena mendapatkan oendidikan merupakan hak mutlak setiap orang, dan untuk itu RSBI menjadi acuan untuk membuat program yang lebih baik kedepannya.

2. Karakteristik Lembaga Penguasa

Pemahaman masyarakat dalam memahami karakteristik dari pemegang kekuasaan maupun lembaga penguasa yang ada saat ini hanya berorientasi pada pencitraan semata. Pemahaman atau opini ini bukan hanya sekedar pemahaman masyarakat tanpa alasan. Hal ini terlihat pasca pembubaran program RSBI oleh MK pada januari kemarin. Beberapa lembaga yang seharusnya membantu pasca pembubaran nyata ya lepas tanggung jawab. Penulis menyimpulkan dari beberapa hasil wawancara dengan sekolah-sekolah sebagai pelaksana program, lembaga seperti Pemerintah provinsi, DPRD, Dinas Pendidikan cenderung lepas tangan. Mereka hanya sibuk melakukan pencitraan di media-media tetapi tidak ada tindakan langsung kesekolah-sekolah yang membutuhkan sosialisasi mengenai status sekolah mereka pasca pembubaran.

Sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut guna untuk menghindari penurunan kualitas pendidikan tidak dilaksanakan sampai saat ini, sehingga sekolah cenderung melaksanakan aturan-aturan sendiri yang bisa merugikan peserta didik maupun orang tua/wali murid.

Bahkan surat edaran pembubaran RSBI pada beberapa sekolah yang penulis datangi itu tidak mereka terima. Mereka mengetahui informasi pembubaran RSBI lebih dari media massa, dan bahkan surat edaran tersebut mereka ambil dari internet, yang seharusnya lembaga-lembaga terkait mengadakan sosialisasi resmi sehingga sekolah-sekolah eks-RSBI memiliki tujuan kedepannya pasca kehilangan status sekolah mereka, dan mutu pendidikan tidak menurun.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Keberhasilan atau kegagalan implementasi program dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Kepatuhan dan daya tanggap dalam hal ini juga berlaku untuk pemerintah daerah dalam memahami tentang suatu peraturan sebagai bentuk kepatuhan terhadap pusat guna mensukseskan suatu program yang telah dibuat. Muatan isi program dan muatan kebijakan publik berpengaruh pada hasil akhir implementasinya. Muatan program atau muatan kebijakan berpengaruh karena dampaknya yang nyata atau yang potensial terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonomi tertentu. Oleh sebab itu penting memperhitungkan konteks atau lingkungan dimana tindakan administrasi berlangsung.

Kepatuhan dan daya tanggap dari unsur pelaksana salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi kegiatan. Sosialisasi kegiatan merupakan tahapan penjelasan umum tentang implementasi program RSBI kepada semua pihak yang berkepentingan bisa dilakukan melalui pendekatan informasi dan teknik keterlibatan.

Dalam hal pelaksanaan RSBI di Pekanbaru secara keseluruhan sekolah-sekolah terlihat patuh dengan semua aturan yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kriteria-kriteria program RSBI yang sulit untuk dilaksanakan tetapi sekolah-sekolah tersebut inovatif dengan meminimalisir kekurangan-kekurangan tersebut. Daya tanggap yang baik juga mereka lihatkan terhadap keaktifan mereka terhadap proses-proses sosialisasi RSBI kendati di adakan dipusat serta pasca pembubaran RSBI, sekolah dengan tetap mempertahankan kualitas meski kekurangan anggaran, sekolah-sekolah merencanakan dengan komite sekolah bagaimana agar tanpa bantuan dari RSBI kualitas pendidikan tidak turun meskipun status sudah berubah, daya tanggap yang baik juga terlihat dari meskipun tidak adanya sosialisasi dan surat edaran langsung dari lembaga-lembaga terkait sekolah dengan sendirinya sadar untuk melepaskan status RSBI agar tidak terjadi kekeliruan peserta didik yang baru maupun masyarakat.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Pekanbaru

Implementasi kebijakan program RSBI di Kota Pekanbaru tidaklah berjalan mulus begitu saja. Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan program ini dari awal pelaksanaannya hingga pasca pembubaran oleh Mahkamah Konsitusi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program RSBI di Kota Pekanbaru antara lain :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program RSBI di sekolah-sekolah RSBI Pekanbaru. Komunikasi yang tidak konsisten dapat dijadikan penyebab tidak terlaksananya implementasi kebijakan program RSBI secara total. Misalnya dalam terjadi perubahan sistem atau peningkatan pelaksanaan kriteria program. Kurangnya komunikasi berupa sosialisasi yang dilakukan menimbulkan kerancuan karena terlalu banyaknya program yang dibebankan kepada pihak-pihak sekolah yang sering berubah-ubah.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program RSBI selama penerapannya di Kota Pekanbaru. Faktor sumber daya ini berkaitan pada masalah tenaga pendidik atau guru, tingginya kriteria program-program RSBI menyulitkan sekolah-sekolah yang tidak semua gurunya berkompoten untuk menyesuaikan diri terhadap program RSBI ini.

3. Dukungan Internal dan Eksternal

Dukungan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan program RSBI. Banyak kebijakan yang masuk dalam zona ketidakacuhan dari lingkungan sekitar. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena adanya dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran program RSBI. Ini dikarenakan rumitnya awal penetapan RSBI yang semua tergantung dari pusat. Pemerintah pusatlah yang menentukan layak atau tidaknya sebuah sekolah melaksanakan program RSBI tanpa melibatkan pemerintah daerah, pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan. Semua kriteria program juga diatur pusat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada di daerah. Bahkan setelah RSBI ditetapkan kepala sekolah langsung yang mendatangi pusat tanpa ada campur tangan dari daerah, padahal untuk melengkapi sarana dan prasarana lebih banyak menggunakan APBD dibandingkan APBN.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan sekaligus untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan program RSBI di Pekanbaru, program ini dapat dikatakan berhasil pelaksanaannya meskipun terdapat berbagai kekurangan, pelaksanaan program ini dimulai pada tahun 2007 di Kota Pekanbaru. Kepentingan pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik sehingga derajat perubahan tercapai dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Manfaat dari adanya program ini menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing secara global dan mampu meningkatkan kualitas peserta didik. Sekolah sebagai pelaksana program ini sudah sangat mandiri dan inovatif, hal ini ditunjukkan

dengan adanya peningkatan kualitas peserta didik serta penambahan sarana dan prasarana yang baik meskipun ada atau tidaknya dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal pelaksanaan program sekolah sudah berupaya secara optimal namun dari proses pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota bisa dikatakan lemah, ini dikarenakan adanya kerancuan dari aturan baku yang ditetapkan pemerintah sehingga proses pengawasan tumpang tindih antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Pendidikan Kota sehingga peran dari dinas itu sendiri kurang terasa manfaatnya oleh sekolah.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Pekanbaru, anatara lain masalah komunikasi, Komunikasi yang tidak konsisten dapat dijadikan penyebab tidak terlaksananya implementasi kebijakan program RSBI secara total. Kurangnya komunikasi berupa sosialisasi yang dilakukan menimbulkan kerancuan karena terlalu banyaknya program yang dibebankan kepada pihak-pihak sekolah yang sering berubah-ubah, disisi lain kualitas SDM yang kurang kompeten mengharuskan sekolah mendatangkan guru bantu yang tentu memerlukan anggaran yang lebih. Untuk pelaksanaan program ini hampir semua unsur mendukung guna peningkatan mutu pendidikan meskipun tidak lepas dengan adanya beberapa pihak yang tidak setuju akan program ini. Birokrasi yang cenderung terpusat juga menyulitkan sekolah-sekolah apabila terdapat masalah-masalah yang harus diatasi.

Saran

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya program RSBI lebih memperhatikan masalah biaya yang menjadi faktor utama pembubaran program yang sudah dijalankan bertahun-tahun ini. Diharapkan kedepannya apabila ada program serupa, pemerintah harus membuat peraturan yang mengayomi semua pihak sehingga tidak terjadi kerancuan dalam proses implementasinya.
2. Pemerintah pusat sebaiknya harus lebih memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri masalah kependidikan didaerah, bukan hanya otonomi daerah yang perlu diperluas, tetapi otonomi pendidikan juga harus diberikan.
3. Sebelum pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi sebaiknya pemerintah tidak mengeneralisasikan permasalahan yang ada dipusat kedaerah. Karena tidak semua program RSBI gagal. Pemerintah seharusnya meninjau terlebih dahulu pelaksanaan program ini didaerah dan lebih memperjuangkan agar program ini tidak dihapuskan. Jika pun dihapuskan itu hanya dilakukan pada daerah-daerah yang gagal saja, karena sangat disayangkan program yang telah dijalankan bertahun-tahun dibubarkan hanya dengan ketukan palu Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, Merille S. 1980. *Politics and Policy Implentationin the Third World*. Princeton: New Jersey Princeton.
- Budihardjo, Mariam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Gramedia.
- Lester, James P. And Joseph Stewart. 2000. *Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Lexy, J. Meleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonsisa.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo kelompok Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan Tidak Untuk Publik*. Yogyakarta: CV. Langit Aksara.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Praktek*. Pekanbaru: Program studi Ilmu Adminidtrasi, Pascasarjana Universitas Riau.
- Suyanto, bagong, Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan perundangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber-Sumber Lainnya

- Skripsi: Amirudin Husaini. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Studi Manajemen Berbasis sekolah*. 2011. Fisip Universitas Riau.
- Skripsi: Didik Marka Hendika. *Implementasi Kebijakan Program kemitraan dengan BUMN*. 2010. Fisip Universitas Riau.
- www.antikorupsi.org (Indonesia Corruption Watch)
- www.kemdiknas.go.id/kemdikbud